

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Ekklesiano Victorson Tumbelaka¹

Marlien T. Lopian²

Fanley Pangemanan³

Abstrak

Tujuan ini penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dari sebuah demokrasi. Salah satu konsep modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebuah demokrasi (Sarbani, 2015). Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2020 kinerja KPU Kota Tomohon khususnya Divisi Perencanaan Program dan Data dengan unit analisis produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas berjalan dengan baik artinya sikap pegawai secara keseluruhan sangat siap mulai dari tahap penyusunan anggaran yang memang sudah ada dalam PKPU no. 2 dan atas dasar keputusan Permendagri 54. kualitas layanan dalam melaksanakan tugas bahwa tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik.

Kata Kunci: : Kinerja, KPUD, Partisipasi Masyarakat

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Dhal mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi (Sorensen, 2003:21). Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak- hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPU juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Dalam membantu tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD dibantu oleh beberapa kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menurut undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum antara lain:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemilu di kecamatan
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/ kelurahan
3. Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), adalah panitia penyelenggara pemungutan suara

Berbagai lembaga tersebut dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk membantu mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah nya. Pelaksanaan Pemilu juga akan berjalan lebih efektif dengan tersedianya penyelenggara Pemilihan yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menjangkau seluruh masyarakat, baik tingkat kecamatan maupun sampai ke desa. Dalam hal ini dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga yang terkait sebelum penyelenggaraan Pemilu, diharapkan mampu mengarahkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan Pemilu. Sehingga pelaksanaan Pemilihan mendapat tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi.

Pada tahun 2020 Kota Tomohon melaksanakan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan walikota dan wakil walikota dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi utara. Berdasarkan Data KPU RI, Kota Tomohon berada di peringkat pertama kota dengan partisipasi pemilih tertinggi dalam Pilkada 2020. Partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilihan wali kota ialah Tomohon (91,98 persen), Tidore Kepulauan (91,34 persen), Ternate (83,82 persen), Sungai Penuh (82,81 persen), dan Blitar (79,2 persen). (manadopost-jawapost.com).

Tingginya partisipasi masyarakat tersebut tidak terlepas dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang melakukan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu dan pilkada Kota Tomohon terus meningkat sejak 2014. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon Nomor 472/PL.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2020 merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Anggota KPUD Kota Tomohon
- Staf KPUD Kota Tomohon
- Masyarakat

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan menggunakan teori kinerja dari Bernardin dan Russel (2013) kriteria dalam pengukuran kinerja dari 6 kriteria, peneliti hanya menggunakan 3 indikator yang tetap untuk membahas materi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kualitas (quality)
2. Efektivitas (cost effectiveness)
3. Komitmen Kerja

Teknik Pengumpulan data melalui

wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi dan kegiatan tersebut sudah dilakukan setiap ada kesalahan selalu dilakukan dengan tepat waktu, pada dasarnya KPU Kota Tomohon tidak menyusun program dan anggaran karena program dan anggaran sudah disusun di tingkatan yang lebih tinggi yaitu KPU RI KPU Kota Tomohon hanya merevisi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan KPU Kota Tomohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kendala-kendala yang muncul lebih banya bersifat teknis seperti dalam wawancara dikatakan kendala server pusat yang sering mengalami gangguan 97 dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah tapi dalam garis besar kendala tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat, kendala lain adalah dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah kelurahan yang banyak membuat kesalahan data seperti kegandaan masih ada tapi tergolong minim, juga banyaknya masyarakat yang tinggal diluar Kota Tomohon juga menjadi masalah tersendiri, kurangnya informasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pemutakhiran data pemilih juga menjadi masalah tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, hasil scan juga bersifat informasi public artinya bukan

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

akhir dari perhitungan menurut hasil wawancara hasil akhir perhitungan adalah rekap manual dari tiap kecamatan yang akhirnya menjadi hasil akhir, sementara hasil scan hanya bersifat pemberitahuan saja, kesalahan dalam hasil scan juga sudah diminimalisir dengan selalu memberikan arahan untuk meneliti terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pen scan nan.

Berdasarkan jawaban pertanyaan dari para informan mengenai kesalahan peneliti simpulkan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi dan kegiatan tersebut sudah dilakukan setiap ada kesalahan selalu dilakukan dengan tepat waktu, begitu pula kendala-kendala yang muncul lebih banyak bersifat teknis seperti dalam server pusat yang sering mengalami gangguan dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah untuk jaringan IT yaitu PT. Telkom, untuk kesalahan internal sendiri biasanya hanya masalah router, kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, akan tetapi kendala yang ada dalam garis besar tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa ada beberapa kesimpulan dalam wawancara diatas diantaranya adalah 1) KPU Kota Tomohon telah melakukan pemutakiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi public, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan bagi masyarakat yang akan memberimaskan ke KPU Kota Tomohon melalui mekanisme yang sudah ditentukan. 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan respnden umum menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap hasil kecermatan KPU Kota Tomohon dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU

Kota Tomohon.

Tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik dan 1) KPU Kota Tomohon telah melakukan pemutakiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi public, 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan respnden umum menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap hasil kecermatan KPU Kota Tomohon dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda 109 maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU Kota Tomohon, selanjutnya kecermatan dalam pengelolaan jaringan IT sudah baik karena setiap anggota devisi pemrograman dan data selalu siap dan sigap serta selalu berkoordinasi dengan pihak lainnya, akan tetapi kecermatan hasil scan KPU Kota Tomohon terutama divisi Pemrograman dan data hanya sebagai pengawas dan pengarah akan tetapi setiap hasil scan yang akan di entry ke server KPU RI, KPU Kota Tomohon akan memverifikasi semua format yang akan di scan yang dimaksudkan agar mendapatkan hasil scan yang akurat, kemudian kecermatan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentan sudah baik, artinya tidak terlepas dari koordinasi antara divisi dengan pihak terkait. Dari 3 kesimpulan diatas mengenai kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas dapat disimpulkan lagi bahwa untuk indikator kualitas layanan mengenai kesalahan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi, begitu pula kendala-kendala yang muncul lebih banyak bersifat teknis seperti dalam server pusat yang sering mengalami gangguan dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah untuk jaringan IT yaitu PT. Telkom, untuk kesalahan internal sendiri biasanya hanya masalah router, kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, akan tetapi kendala yang ada dalam garis besar tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat

Penutup

Kesimpulan

Dana Desa adalah dana yang Dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2020 kinerja KPU Kota Tomohon khususnya Divisi Perencanaan Program dan Data dengan unit analisis produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas berjalan dengan baik artinya sikap pegawai secara keseluruhan sangat siap mulai dari tahap penyusunan anggaran yang memang sudah ada dalam PKPU no. 2 dan atas dasar keputusan Permendagri 54, dalam tahap penyusunan sendiri sudah dimulai tiga tahun sebelum pelaksanaan Pemilkada, begitupula dengan persiapan sarana penunjang lain seperti ketersediaan jaringan IT yang memang menjadi faktor penting dalam pemutakhiran data dan scan hasil pemilu yang nantinya dikirim ke server pusat KPU RI, kualitas layanan dalam melaksanakan tugas bahwa tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik.

Responsivitas bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data selalu menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui PPS hal tersebut juga dilakukan Divisi Perencanaan Program dan Data dengan memberikan informasi-informasi ter akurat. Kemudian tanggungjawab bahwa kesesuaian aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada.

Saran

1. Diharapkan kiranya KPU Kota Tomohon agar dapat meningkatkan kinerja dan lebih baik lagi untuk tahapan-tahapan Pemilu berikutnya, terlebih di tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislative serentak.
2. Komunikasi antar penyelenggara pemilu yakni bawaslu dan juga

pemerintah daerah kota tomohon dapat ditingkatkan sehingga kemungkinan kesalahan dan pelanggaran dapat dihindari sedini mungkin

3. Proses perencanaan baiknya dimatangkan agar supaya dalam implementasi penyelenggaraan pemilu kedepan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya pelanggaran

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bernardin and Russel.2013.*Human Resource Management, An. Experimental Approach, terjemahan.*Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2007. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Gomes, Faustino Cardoso. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia.*Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Adminitrasi Publik.* Edisi Kedua, Alfabeta, Bandung.
- Poerwadaraminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai
- Prawirosentono.S, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. BPFE, Yogyakarta.
- Rivai,Veithzal.2012.*Manajemen Sumber*

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Daya Manusia untu

Perusahaan. Jakarta: PT.RajaGrafindo
Persada.

Robbins Stepehen. 2008. Organizational Behaviour. Tenth Edition. (perilaku organisasi edisi kesepuluh) Slih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta; Salemba Empat.

Sandy Martha, Muhammad. 2015. *“Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”*. Tesis di Universitas Widayatama Bandung

Sarbani. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, 1, Vol (8) hlm.105-117

Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi , Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Edisi Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Sorensen G. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta,Bandung.

Wahidin S, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Winarno, B. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.